



**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAERAH MENJADI PENJABAT
KEPALA PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus Kekosongan Jabatan Kepala
Pemerintah Daerah Pada Tahun 2022)**

SKRIPSI

YOAN DWI PRATAMA

1810611317

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN SEKRETARIS
DAERAH MENJADI PENJABAT KEPALA PEMERINTAH
DAERAH**

**(Studi Kasus Kekosongan Jabatan Kepala Pemerintah
Daerah Pada Tahun 2022)**

YOAN DWI PRATAMA

1810611317

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Tim Penguji

Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 April 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum



Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas
Akhir



Dr. Taufiqurrohman Syahuri,
S.H., M.H.

NIP.196005020002056002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Yoan Dwi Pratama

NPM : 1810611317

Program Studi : Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Pengangkatan
Sekretaris Daerah Menjadi Penjabat
Kepala Pemerintah Daerah (Studi
Kasus Kekosongan Jabatan Kepala
Pemerintah Daerah Pada Tahun 2022)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua penguji



Khoirur Rizal Lutfi S.H., M.H

Penguji 1



Ali Imron Nasution, S.H., M.H.

Penguji 2



**Dr. Taufiqurrohman
Syahuri S.H., M.H.**

Dekan



H. H. Abdul Halim, M.Ag.

Kepala Program Studi



Taupiqurrahman, SH., M.kn.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 – Mei – 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Yoan Dwi Pratama
Tempat/ Tgl. Lahir : Depok, 28 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Swadaya 1 No.11B, RT.01/RW.12,
Kec.Pancoranmas/Kel.Pancoranmas,
Kota Depok
No. Telpon : 087776027209
Email : yoandwip@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Alm.Sabar
b. Ibu : Suparti

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Depok Baru 3 (lulus tahun 2012)
2. SMP : SMPN 5 Depok (lulus tahun 2015)
3. SMA : SMAN 1 Depok (lulus tahun 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. SPORTAVEST (tahun 2020)
2. Komisi Pemilihan Raya FH UPNVJ (tahun 2020)
3. Dewan Yudisial Pemira (tahun 2021)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Yoan Dwi Pratama

N.I.M. : 1810611317

Tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yoan Dwi Pratama

NIM/NPM : 1810611317

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAERAH MENJADI PENJABAT KEPALA
PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kekosongan Jabatan
Kepala Pemerintah Daerah Pada Tahun 2022)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13- Mei -
2022



Yoan Dwi Pratama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberiiikan rahmat kepada saya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tugas akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberiiikan kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini dan secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang Tua, Ibu Suparti dan (alm) Bapak Sabar yang tiada henti mendukung serta mencurahkan kasih sayangnya secara spiritual, moral, dan materil kepada penulis;
2. Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberiiikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir ini;
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Kepala Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberiiikan ilmu kepada penulis;
6. Teman–teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung;
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan hingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari betul tugas akhir ini masih

banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. .

Jakarta, 1 April 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a small hook.

Yoan Dwi Pratama

ABSTRAK

Amanat Undang-Undang yang menghendaki penyelenggaraan pilkada secara serentak pada tahun 2024 menimbulkan kekhawatiran terhadap kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah yang timbul akibat dari ditundanya pemilihan kepala Pemerintah daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023, beberapa muncul sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah menjadi solusi guna mengisi kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah salah satunya melalui pengangkatan sekretaris daerah sebagai Penjabat kepala Pemerintah daerah, mengenai opsi sekretaris daerah sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah perlu ditinjau secara yuridis mengenai pengangkatan sekretaris daerah menjadi penjabat kepala Pemerintah daerah melalui undang-undang, peraturan, dan asas yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis lakukan yakni termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa pengangkatan sekretaris daerah ditinjau dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan muatan pasal 201 ayat (11) yang memberiikan klasifikasi jabatan pejabat tinggi madya sebagai penjabat gubernur dan jabatan pejabat tinggi pratama sebagai penjabat bupati/walikota, sebagaimana yang dipahami bahwa sekretaris daerah termasuk ke dalam jabatan pejabat tinggi madya pada tingkat daerah provinsi dan jabatan pejabat tinggi pratama pada tingkat daerah kabupaten/kota, selain itu juga secara konseptual sekretaris daerah dalam Pemerintahan daerah berperan sebagai penjabat yang membantu kepala Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dan juga sebagai substitusi apabila kepala Pemerintah daerah dan wakil kepala Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bersamaan. Berdasarkan penelitian ini maka perlu ditetapkannya pengaturan mengenai pengangkatan sekretaris daerah sebagai penjabat kepala Pemerintah daerah.

Kata kunci: Kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah, Sekretaris daerah, Penjabat.

ABSTRACT

The mandate of the law that requires simultaneous regional elections in 2024 raises concerns about the vacancy in the position of regional government heads arising from the postponement of regional government elections in 2022 and 2023. filling the vacancy in the position of the head of the regional government, one of which is through the appointment of the regional secretary as the acting head of the regional government, regarding the option of the regional secretary as the acting head of the regional government, it needs to be reviewed legally regarding the appointment of the regional secretary to become the acting head of the regional government through laws, regulations and principles that applies in Indonesia. The type of research that the author does is included in normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study conclude that the appointment of regional secretaries in terms of statutory regulations such as Law Number 10 concerning Regional Elections and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accordance with the contents of article 201 paragraph (11) which provides a classification of high official positions Madya as acting governor and high-ranking official position as acting regent/mayor, as it is understood that the regional secretary is included in the position of middle high official at the provincial level and the post of high-ranking official at the district/city level, but conceptually the regional secretary In regional government, it acts as an official who assists the head of the regional government in carrying out their duties and authorities, and also as a substitute if the head of the regional government and the deputy head of the regional government cannot carry out their duties simultaneously. Based on this research, it is necessary to stipulate arrangements regarding the appointment of regional secretaries as acting heads of regional governments.

Key Word: Vacancies of regional government heads, regional secretaries, official.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
BIODATA PENULIS	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Teori	22
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	49
A. Pengaturan tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Daerah Serentak	49
B. Wacana Pengisian Penjabat Kepala Pemerintah Daerah.....	55
C. Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Daerah 58	
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Pemerintah Daerah.....	61

B. Peluang Sekretaris Daerah dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah 2022	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Table 1 data daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2017.....54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 2	:	Bukti Check Turnitin
Lampiran 3	:	Berita Acara Hasil Ujian